

FAQ Kepabeanan

BAB Kepabeanan

<i>Undang Undang Kepabeanan.....</i>	<i>1</i>
<i>Tatalaksana Kepabeanan Ekspor.....</i>	<i>6</i>
<i>Tatalaksana Kepabeanan Impor</i>	<i>11</i>
<i>Fasilitas Kepabeanan</i>	<i>16</i>
<i>Tempat Penimbunan Berikat.....</i>	<i>20</i>
<i>Prosedur Penyetoran, Pengembalian, Penagihan & Sanksi, Keberatan, Banding</i>	<i>25</i>
<i>Larangan dan Pembatasan</i>	<i>29</i>
<i>Sistem Nilai Pabean.....</i>	<i>34</i>

Undang Undang Kepabeanan

1. Kepabeanan Adalah?

Jawaban:

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk atau Bea Keluar

2. Pemeriksaan pabean yang dilakukan terhadap barang impor meliputi

Jawaban:

Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang

3. Barang yang diperlakukan sebagai barang impor dan terhutang bea masuk adalah barang yang dimasukkan ke

Jawaban:

Daerah Pabean

4. Tempat Penimbunan Sementara adalah tempat untuk menimbun

Jawaban:

Barang impor dan barang ekspor sementara menunggu pengeluaran atau pemuatannya

5. Daerah dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut Jawaban:

Kawasan Pabean

6. Pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini tertera di dalam UU Pabean merupakan

Jawaban:

Pemberitahuan Pabean

7. Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak

Jawaban:

Tanggal pemberitahuan pabean atas impor

8. Yang dimaksud dengan "menegah barang" Adalah

Jawaban:

Tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean

9. Berikut ini termasuk kesalahan tata usaha dimana bea masuk yang lebih bayar dapat diberikan pengembalian, kecuali

Jawaban:

Kesalahan pemberitahuan nilai pabean

10. Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, maka ditetapkan

Jawaban:

Kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean

11. Hak mendahului untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang melebihi segala hak mendahului lainnya, yaitu

Jawaban:

Bea masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan

12. Pihak yang dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia ialah

Jawaban:

Ketua Pengadilan Niaga

13. Yang dimaksud dengan tempat tertentu pada pengertian daerah pabean Adalah

Jawaban:

Daerah di ZEE dan Landas Kontinen dimana ada/terjadi suatu kegiatan tertentu

14. Pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan Adalah

Jawaban:

Pengusaha TPS, TPB, PPJK, Eksportir, Importir dan Pengusaha Pengangkutan

15. Yang termasuk Tempat Lainnya Dalam Daerah Pabean (TLDDP) Adalah

Jawaban:

Kawasan Industri

16. Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu

Jawaban:

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean

17. Tanggung jawab Bea Masuk terhadap barang impor yang pemasukannya mendapatkan pembebasan atau keringanan Bea Masuk, namun ketentuan pembebasan atau keringanan Bea Masuk tersebut tidak dipenuhi karena orang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan tidak ditemukan, berada pada

Jawaban:

Orang yang menguasai barang yang bersangkutan

18. Pejabat bea dan cukai dapat menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean, dalam hal

Jawaban:

Perintah tertulis Ketua Pengadilan Niaga

19. Yang dimaksud dengan barang diangkut terus Adalah

Jawaban:

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

20. Terhadap barang impor sementara yang tidak di ekspor kembali pada waktunya, dan yang bersangkutan ingin melunasi Bea Masuk nya, maka terhadap barang tersebut

Jawaban:

Dipungut Bea Masuk dan PDRI dan Denda Administrasi dengan Nilai Pabean pada saat masuk ke dalam Daerah Pabean

21. Apabila terdapat lonjakan permintaan barang impor yang mengakibatkan kerugian serius atas barang sejenis produksi dalam negeri maka atas barang impor tersebut dapat dikenakan

Jawaban:

Bea Masuk Tindakan Pengamanan

22. Tempat penimbunan Pabean adalah bangunan dan lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, dibawah DJBC untuk menimbun barang-barang di bawah ini kecuali

Jawaban:

Barang yang mendapatkan fasilitas

23. Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan, maka ...

Jawaban:

Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar

24. Berikut ini yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk

Jawaban:

Barang yang mengalami penyusutan volume karena alamiah saat diangkut ke dalam daerah pabean sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai

25. Pembukuan, catatan dan surat menyurat yang bertalian dengan impor dan ekspor wajib disimpan oleh importir dan eksportir dalam waktu

Jawaban:

10 Tahun

26. Bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk disebut

Jawaban:

Tempat Penimbunan Berikat

27. Jumlah dan jenis barang berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa, didasarkan pada

Jawaban:

Saat pengukuran ditempat pengukuran terakhir di dalam daerah pabean

28. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai

Jawaban:

Barang yang dikuasai negara

29. Yang bukan termasuk pelanggaran pidana di bidang ekspor Adalah

Jawaban:

Salah memberitahukan jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean

30. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi

Jawaban:

Wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, termasuk tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen

Tatalaksana Kepabeanan Ekspor

1. Pengeluaran barang ekspor yang dibatalkan ekspornya dari kawasan pabean menggunakan dokumen?

Jawaban:

SPPBE (Surat Pemberitahuan Pembatalan Ekspor)

2. Barang ekspor dibawah ini dapat dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar, kecuali?

- A. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan
- B. Barang asal impor yang kemudian diekspor Kembali
- C. Barang Pribadi Penumpang dan Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman dengan Nilai Pabean Ekspor melebihi Rp 2.500.000,00
- D. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Jawaban:

Barang Pribadi Penumpang dan Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman dengan Nilai Pabean Ekspor melebihi Rp 2.500.000

3. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PEB Adalah...

Jawaban:

Pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang

4. Atas barang ekspor yang diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai, jika jenis barang perlu dilakukan penelitian laboratorium, maka ...

Jawaban:

Menggunakan laboratorium milik DJBC

5. Konsolidasi barang ekspor dilakukan di?

Jawaban:

Di luar Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ke sarana pengangkut

6. SAT LN adalah dokumen perizinan ekspor untuk?

Jawaban:

Tumbuhan langka dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan

7. PEB disampaikan Eksportir ke kantor pabean pemuatan?

Jawaban:

Paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean

8. Ekspor barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, dikecualikan dari pemeriksaan fisik terhadap?

Jawaban:

Eksportir yang telah mendapatkan pengakuan sebagai AEO

9. Pembatalan PEB terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar lebih dari 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut...

Jawaban:

Diperbolehkan dan dikenakan denda administrasi

10. Pemeriksaan fisik barang ekspor dapat dilakukan di?

Jawaban:

Di tempat eksportir, di kawasan pabean atau di tempat lain yg dimohonkan

11. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut menuju keluar daerah pabean..

Jawaban:

Dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor

12. Konsolidasi Barang Ekspor adalah kegiatan?

Jawaban:

Mengumpulkan Barang Ekspor yang diberitahukan dalam dua atau lebih PEB dengan menggunakan satu petikemas sebelum Barang Ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat keatas sarana pengangkut

13. Ekspor sisa dan skrap logam dari baja paduan hanya dapat dilakukan oleh eksportir pada..

Jawaban:

Pulau Batam

14. Salah satu kriteria pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan diekspor adalah

Jawaban:

Barang untuk perbaikan / reparasi

15. Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal akan dilakukan pemeriksaan fisik di Kawasan Pabean menggunakan dokumen

Jawaban:

PEB dan PPB

16. Yang dimaksud dengan Barang Ekspor Gabungan adalah barang ekspor yang wajib diekspor dalam satu kesatuan unit yang merupakan

Jawaban:

Penggabungan barang hasil produksi fasilitas KITE dengan produksi fasilitas KITE lainnya

17. Tanggal perkiraan ekspor adalah

Jawaban:

Tanggal selesai pemuatan ke sarana pengangkut

18. Pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya dapat dilakukan

Jawaban:

Sebelum atau sesudah PEB disampaikan

19. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar maka

Jawaban:

Dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara

20. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) terhadap barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik, ditandatangani oleh

Jawaban:

Petugas Pengawasan Suffing dan Petugas Dinas Luar

21. Pemeriksaan fisik barang yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan profil eksportir dan profil barang dikenakan terhadap

Jawaban:

Barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE

22. Pembetulan data PEB mengenai penggantian nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, tanggal perkiraan ekspor yang disebabkan oleh short shipment, dapat dilayani

Jawaban:

Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut semula

23. Pemeriksaan barang ekspor dilakukan dalam hal barang ekspor

Jawaban:

Terkena bea keluar

24. Komoditi barang ekspor yang terkena bea keluar adalah, kecuali

- A. Konsentrat tembaga
- B. Biji kopi
- C. Kulit samak
- D. Serpih kayu

Jawaban:

Biji kopi

25. Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE Adalah

Jawaban:

Laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor dengan fasilitas KITE, yang diterbitkan oleh kantor pabean pemuatan setelah dilakukan rekonsiliasi

26. PEB akan mendapatkan respon PPB (Pemberitahuan Pemeriksaan Barang) dalam hal

Jawaban:

Barang ekspor akan diimpor Kembali

27. Kesalahan data PEB dapat dibetulkan jika kesalahan berupa

Jawaban:

Nomor petikemas

28. Pemeriksaan pabean dalam kegiatan ekspor meliputi

Jawaban

Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik dalam hal tertentu

29. Barang ekspor berupa produk tekstil jika terjadi perubahan nilai FOB, maka atas nilai FOB tersebut

Jawaban:

Dapat dibetulkan paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB

30. BC 3.3 adalah dokumen yang digunakan untuk

Jawaban:

Pemberitahuan pabean ekspor dari Pusat Logistik Berikat

Tatalaksana Kepabeanan Impor

1. Pengangkut yang terlambat menyerahkan pemberitahuan mengenai barang yang diangkutnya atau inward manifest?

Jawaban:

Dikenai sanksi administrasi berupa denda minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 100 juta

2. Bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing Adalah

Jawaban:

Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard)

3. Penyampaian RKSP oleh pengangkut yang akan datang dari Luar Daerah Pabean melalui laut paling lambat ...

Jawaban:

24 jam sebelum kedatangan

4. Bea Masuk yang dikenakan terhadap barang impor apabila harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya adalah ...

Jawaban:

Bea Masuk Antidumping

5. PIB dan dokumen pelengkap pabean disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang yang menggunakan system Pertukaran Data Elektronik (PDE). Dikecualikan dari kewajiban tersebut untuk operator ekonomi atau Importir...

Jawaban:

MITA Kepabeanan dan AEO

6. Dalam hal penetapan nilai pabean atas barang impor lebih besar daripada pemberitahuan pabean namun tarif bea masuknya sebesar 0% dan mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran pungutan impor, maka importir wajib melunas

Jawaban:

Pembayaran ditambah sanksi administrasi denda sebesar Rp 5 juta

7. Suatu barang impor memiliki nilai total FOB USD 15,000 dan barang dikirim dari Jepang lalu pada Bill of Lading nilai freight dinyatakan freight collect. Maka besarnya nilai freight yang harus dimasukkan sebagai nilai pabean Adalah

Jawaban:

USD 1,500

8. Pemberitahuan Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran adalah ...

Jawaban:

BC 1.1

9. Untuk PIB Jalur Hijau, Pejabat Pemeriksa Dokumen diwajibkan meneliti kebenaran tarif dan kewajaran nilai pabean serta pelunasan Bea Masuk, Cukai dan PDRI dalam jangka waktu paling lama ...

Jawaban:

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB

10. Nilai Dasar Pembayaran Bea Masuk (NDPBM) yang berlaku untuk penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk PIB biasa yang menggunakan sistem MPN G2 adalah ...

Jawaban:

Saat terbit respon billing

11. Pembayaran berkala diizinkan untuk importir

Jawaban:

Yang mendapatkan izin PIB Berkala

12. Pernyataan berikut ini Adalah benar:

Jawaban:

Jalur hijau Adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB

13. Tanggung jawab berkenaan dengan pengajuan perbaikan data inward manifest atau BC 1.1 dibebankan kepada

Jawaban:

Pengangkut

14. Pemberitahuan uraian barang dalam pos-pos manifest wajib menunjukkan klasifikasi sekurang-kurangnya

Jawaban:

4 (empat) digit pos Harmonized System

15. Apabila waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan kurang dari 24 jam, penyampaian pemberitahuan RKSP dilakukan paling lambat

Jawaban:

Sebelum kedatangan Sarana Pengangkut

16. Impor sementara berupa mesin untuk melakukan pengujian diberikan kemudahan

Jawaban

Keringanan bea masuk

17. Apabila importir dikenakan SPTNP, maka atas permintaan yang bersangkutan, dimungkinkan untuk mendapatkan pengangsuran kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda atas SPTNP tersebut, paling lama

Jawaban:

12 bulan sejak tanggal SPTNP

18. PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dapat dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut, kecuali

Jawaban:

Adanya kesalahan penerapan peraturan karena ketidaktahuan importir

19. Berikut ini pernyataan yang benar untuk PIB Eksep

Jawaban:

Dapat diberikan dengan permohonan dan pengeluaran barang

menggunakan PIB semula dengan syarat paling lama 60 hari sejak tanggal SPPB

20. Tingkat pemeriksaan fisik terhadap barang impor yang diimpor oleh importir beresiko menengah Adalah

Jawaban:

30%

21. Pengajuan PIB secara berkala dilakukan dalam hal

Jawaban:

Impor melalui pipa atau transmisi

22. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, pada Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24/7, Importir atau PPJK yang dikuasakannya wajib menyampaikan kesiapan barang paling lambat

Jawaban:

Pukul 12.00 pada hari berikutnya

23. Importir X mengimpor 3.500 ton beras jenis Pathumthanee dari Thailand dengan harga CIF THB 15.000,- / ton. Bila tarif Bea Masuk Rp 550,-/kg dan NDPBM THB 1 = Rp 250,52 maka bea masuk yang wajib dibayar X Adalah

Jawaban:

Rp 1.925.000.000,-

24. Pemberitahuan pabean untuk impor barang pribadi penumpang menggunakan dokumen

Jawaban:

BC 2.2

25. Atas impor barang pindahan dapat diberikan pembebasan dalam hal yang bersangkutan telah tinggal diluar negeri minimal

Jawaban:

1 tahun

26. Dalam hal nilai barang impor oleh pelintas batas melebihi pembebasan, maka

Jawaban:

Harus diekspor kembali

27. Barang impor sementara yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk adalah

Jawaban:

Peralatan untuk seminar

28. Barang impor sementara yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk Adalah

Jawaban:

Mesin industri manufaktur

29. Pemasukkan barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang yang terdaftar pada kargo pesawat diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean

Jawaban:

PIBK (BC 2.1)

30. Dalam hal impor sementara diberikan fasilitas keringan, maka PPN impor

Jawaban:

Dibayar seluruhnya

Fasilitas Kepabeanan

1. Terhadap importir yang terlambat menyelesaikan kewajiban penyerahan PIB definitif dalam pelayanan segera, maka

Jawaban:

Dikenakan sanksi denda 10% dari bea masuk

2. Jangka waktu penyelesaian skema vooruitslag yang dapat diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai Adalah?

Jawban:

30 Hari

3. Pengertian truckloosing Adalah

Jawaban:

Pembongkaran barang impor secara langsung dari kapal ke atas alat angkut darat tanpa terlebih dahulu ditimbun di TPS

4. Terhadap barang impor sementara untuk keperluan pameran, seminar, konferensi, atau kegiatan semacam itu jangka waktu impor sementara diberikan untuk jangka waktu

Jawaban:

Paling lama satu tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi

5. Sesuai ketentuan origin dalam rangka perjanjian preferensi tarif, suatu barang impor harus memenuhi kriteria sebagai berikut

Jawaban:

Kriteria barang

6. Batas waktu yang normal dalam penerbitan SKA oleh negara pengekspor Adalah

Jawaban:

Keberangkatan kapal sampai dengan 3 hari berikutnya

7. Untuk ekspor ke Palestina dengan skema perjanjian FTA Bilateral, dokumen SKA yang harus dilengkapi Adalah

Jawaban:

From P

8. Kendaraan bermotor untuk keperluan Kantor Perwakilan Negara asing atau perwakilan konsuler dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan, telah digunakan

Jawaban:

3 (tiga) tahun

9. Syarat lama tinggal di luar negeri secara terus menerus, bagi pekerja Indonesia di luar negeri yang ingin mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk atas barang pindahannya, paling singkat

Jawaban:

1 (satu) tahun

10. Pengajuan permohonan skema fasilitas pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal ditujukan kepada

Jawaban:

Kepala BKPM

11. Dasar hukum pemberian fasilitas KITE pengembalian Adalah

Jawaban:

Pasal 27 ayat 1 huruf (b)

12. Mitra Utama Kepabeanan Adalah

Jawaban:

Importir dan/atau Eksportir yang mendapat perlakuan khusus pelayanan kepabeanan

13. Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, dilaksanakan oleh

Jawaban:

Menteri Keuangan

14. Status MITA Kepabeanan akan dibekukan dalam hal

Jawaban:

Tidak lagi memenuhi persyaratan MITA

15. Penyelesaian kewajiban atas fasilitas pembayaran berkala oleh MITA dilakukan

Jawaban:

Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan pengajuan PIB

16. Proses penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas pengajuan permohonan AEO harus dilakukan paling lama

Jawaban:

60 hari

17. Importir yang mendapat kemudahan pelayanan segera diwajibkan menyerahkan PIB definitif dalam jangka waktu paling lama

Jawaban:

Tujuh hari sejak tanggal pengeluaran barang impor

18. Salah satu karakteristik barang impor yang dapat diberikan fasilitas pelayanan segera Adalah

Jawaban:

Barang yang peka waktu

19. Izin fasilitas vooruitslag dapat diberikan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dengan alasan

Jawaban:

Importir telah mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan BM

20. Penyelesaian impor barang dengan fasilitas vooruitslag dilakukan dengan cara penyerahan

Jawaban:

PIB untuk dipakai dan jaminan

21. Pengajuan PIB dengan fasilitas prenotification bagi importir dilaksanakan

Jawaban:

Sebelum pengangkut menyampaikan pemberitahuan pabean BC 1.1

22. Izin returnable package atas barang impor diberikan oleh

Jawaban:

Kepala Kantor Bea dan Cukai

23. Jangka waktu berlakunya dokumen ATA Carnet atau CPD Carnet

Jawaban:

Paling lama 12 (dua belas) bulan

24. CPD Carnet dapat menjamin atas pemasukan barang impor sementara sebagai berikut

Jawaban:

Kendaraan pribadi perseorangan untuk keperluan touring

25. Skema preferensi ATIGA merupakan skema antar negara-negara

Jawaban:

ASEAN

26. Untuk mengekspor barang ke Jepang dalam rangka mendapatkan keringanan tarif bea masuk skema Indonesia-Japan EPA, maka eksportir Indonesia harus melengkapi persyaratan originalitas atas barang (SKA) berupa

Jawaban:

Form IJEPA

27. Terhadap barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas berlaku fasilitas

Jawaban:

Pembebasan BM (termasuk BMT), pembebasan PPN dan tidak dipungut PPh Pasal 22

28. Dokumen pemberitahuan pengeluaran barang dari KEK untuk tujuan ekspor Adalah

Jawaban:

PPKEK

29. Berikut ini adalah kategori barang yang mendapat fasilitas pembebasan relatif, kecuali

Jawaban:

Barang keperluan IPTEK

30. Jangka waktu penelitian atas permohonan pengembalian dari pemegang KITE Pengembalian Adalah

Jawaban:

20 hari kerja

Tempat Penimbunan Berikat

1. Berikut ini adalah bentuk-bentuk Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 32 tahun 2009, kecuali

- A. Gudang Berikat
- B. Tempat Lelang Berikat
- C. Entrepot Tujuan Pameran
- D. Kawasan Daur Ulang Berikat

Jawaban:

Entrepot Tujuan Pameran

2. Pengeluaran barang hasil produksi KB dengan tujuan dijual ke TLDDP hanya dapat dilakukan paling banyak

Jawaban:

50% dari nilai realisasi tahun yang lalu dari ekspor, antar KB, FTZ dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan

3. Dasar penghitungan Bea Masuk untuk pengeluaran barang dari GB untuk dipakai Adalah

Jawaban:

Nilai pabean pada saat pemasukan barang impor ke GB dan pembebanan pada saat pendaftaran BC 2.5 di Kantor Pabean yang mengawasi GB

4. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berkewajiban melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang mendapat

fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dengan mendapatkan pengawasan dari Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean, paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu

Jawaban:

1 (satu) tahun

5. Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dikeluarkan ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) harus dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat asal dalam jangka waktu paling lama

Jawaban:

30 (tiga puluh) hari setelah pameran selesai

6. Kawasan Berikat wajib menyampaikan laporan dampak ekonomi

Jawaban:

1 Tahun Sekali

7. Jenis TPB yang wajib berada di kawasan industri atau jika berada di luar Kawasan Industri harus memenuhi ketentuan luasan minimal Adalah

Jawaban:

Kawasan Berikat

8. Ketentuan pembatasan belum berlaku di Kawasan Berikat kecuali untuk kepentingan

Jawaban:

Kesehatan

9. Dokumen untuk pemasukan barang ke PDKB untuk diolah yang berasal dari TLDDP yaitu

Jawaban:

BC 4.0

10. Pembekuan izin GB dilakukan bilamana

Jawaban:

Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut

11. Selisih kurang karena adanya penguapan atau penyusutan barang impor di KB diperlakukan

Jawaban:

Diberikan pembebasan dari tanggung jawab bea masuk dan pungutan impor lainnya

12. Barang modal dan peralatan pabrik asal impor dapat dipindahtangankan ke TLDDP dengan pembebasan bea masuk setelah dimasukkan ke KB sekurang-kurangnya dalam waktu

Jawaban:

4 tahun

13. Dokumen untuk pemasukan barang ke KB untuk diolah di KB yang berasal dari TLDDP yaitu

Jawaban:

BC 4.0

14. Atas pemasukan BKP untuk diolah lebih lanjut dari TLDDP ke PDKB diberikan fasilitas

Jawaban:

Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM

15. Kepemilikan barang di PLB dapat berlaku sebagai berikut, kecuali

Jawaban:

Buyer di negara tujuan ekspor

16. Orang yang tidak berhak membeli barang di TBB dalam kota dengan mendapatkan pembebasan bea masuk Adalah

Jawaban:

WN asing yang bekerja di Indonesia

17. Dasar pengenaan BM terhadap produk KB yang dikeluarkan ke TLDDP, apabila pada saat pemasukan bahan baku ke KB sudah terjadi transaksi dan perhitungan konversi jelas

Jawaban:

Nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku saat barang impor masuk KB, dan tarif saat BC 2.5 diajukan

18. Janji layanan perizinan Kawasan Berikat mulai dari permohonan hingga persetujuan

Jawaban:

3 (tiga) hari kerja di Kantor Pelayanan untuk pemeriksaan lokasi dan 1 (satu) jam untuk presentasi di Kanwil/KPU DJBC

19. Pembelian barang dengan pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut oleh turis asing di toko bebas bea dalam kota, dilakukan sebagai berikut

Jawaban:

Turis asing membeli barang dengan hak pembebasan namun penyerahan fisik barang yang dibeli dilakukan di TBB di terminal/pelabuhan keberangkatan

20. Penyelesaian kewajiban pabean atas barang modal asal impor yang pada saat pemasukannya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (master list BKPM) dari PDKB diatur sebagai berikut

Jawaban:

Dibebaskan dari kewajiban pembayaran bea masuk terutang dalam hal Barang Modal dimasukkan ke KB selama lebih dari 4 tahun atau telah diimpor selama lebih dari 5 tahun

21. Pemasukan kembali barang ke PDKB dari TLDDP eks sub kontrak menggunakan dokumen

Jawaban:

BC 2.6.2

22. Dokumen untuk melindungi pengeluaran barang dari GB ke PDKB Adalah

Jawaban:

BC 2.7

23. Berikut ini jenis-jenis Gudang Berikat

Jawaban:

GB pusat distribusi khusus TBB, GB transit tujuan luar daerah pabean, dan GB untuk pendukung industri dalam daerah pabean

24. Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat berupa barang untuk pembangunan dan perluasan gudang dan/atau

peralatan kantor

Jawaban:

Tidak diberikan fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan

25. Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke TBB

Jawaban:

Tidak dipungut PPN dan PPnBM

26. Status kepemilikan barang dengan sistem konsinyasi diizinkan untuk jenis TPB

Jawaban:

Pusat Logistik Berikat

27. Pencabutan izin PDKB dilakukan bilamana

Jawaban:

Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut

28. Pemasukan barang impor dari kawasan pabean ke Pusat Logistik Berikat menggunakan

Jawaban:

BC 1.6

29. Barang pameran Golongan G, adalah barang pameran

Jawaban:

Yang akan dijual

30. Tempat Penimbunan Berikat Adalah

Jawaban:

Bangunan dan / lapangan atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk

Prosedur Penyetoran, Pengembalian, Penagihan & Sanksi, Keberatan, Banding

1. Nomor referensi yang paling sah untuk digunakan sebagai pembuktian pembayaran penerimaan negara Adalah

Jawaban:

Nomor Transaksi Penerimaan Negara

2. Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor (PDRI) dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal

Jawaban:

Pembayaran atas kewajiban terhadap penumpang, awak sarana pengangkut atau pelintas batas

3. Setelah Wajib Bayar melakukan Pembayaran Penerimaan Negara melalui Bank/Pos Persepsi, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah menerima

Jawaban:

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

4. Tindakan yang diambil oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Penetapan atau Keputusan dalam rangka memulihkan hutang pajak/kekurangan tagihan pajak/denda administrasi/bunga yang timbul berdasarkan ketentuan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku, disebut

Jawaban:

Penagihan Administratif

5. Salah satu penerimaan Negara dalam rangka ekspor, yaitu

Jawaban:

Denda administrasi ekspor selain bea keluar

6. Dokumen penagihan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai antara lain: SPTNP, SPP, SPKTNP, dan sebagainya memiliki tiga fungsi sekaligus, yaitu

Jawaban:

Dokumen penetapan/pemberitahuan/penagihan

7. Jangka waktu paling lambat untuk pencairan dana pengembalian Adalah

Jawaban:

30 Hari

8. Sanksi Administrasi Berupa Denda untuk pengangkut Barang Impor yang terlambat menyerahkan inward manifes , dikenakan berjenjang berdasarkan jumlah pelanggaran selama enam bulan terakhir. Untuk pelanggaran ke-4, denda akan dikenakan sebesar

Jawaban:

Rp 50.000.000

9. Apabila tarif bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran adalah 0% , maka denda ditetapkan sebesar

Jawaban:

Rp 5.000.000

10. PT. SSS mengimpor satu party barang A dengan membayar PDRI Rp 42.500.000,- dan bea masuk Rp 0,- karena salah memberitahukan nilai pabean maka pejabat BC menghitung kembali PDRI yang seharusnya dibayar yaitu sebesar Rp 64.600.000,- maka sanksi administrasi yang wajib dibayar Adalah

Jawaban:

Rp 5.000.000

11. Orang yang mengajukan keberatan tidak wajib menyerahkan jaminan bila

Jawaban:

Masih berada di kawasan pabean

12. Orang pribadi atau badan hukum yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan Penerimaan Negara menurut peraturan perundang-undangan, disebut sebagai

Jawaban:

Wajib setor

13. NDPBM yang berlaku untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk PIB Bayar, adalah NDPBM yang berlaku saat

Jawaban:

Penyerahan PIB ke Kantor Bea dan Cukai (sesuai billing yang diterima)

14. Dalam sistem pembayaran menggunakan E-Billing tanda bukti pembayaran yang akan diterima wajib bayar berupa

Jawaban:

Bukti penerimaan negara

15. Surat tagihan untuk melaksanakan penagihan diterbitkan sejak tanggal Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean paling lambat

Jawaban:

60 (enam puluh) hari

16. Terhadap paket-paket kiriman pos yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia, penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di

Jawaban:

Kantor Pos setempat

17. Jaminan dari perusahaan asuransi untuk kegiatan kepabeanan Adalah

Jawaban:

Jaminan Customs Bond

18. Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan Surat Teguran apabila Penanggung belum melakukan pelunasan paling lama

Jawaban:

7 (tujuh) hari

19. Jatuh tempo tagihan pungutan pabean Adalah

Jawaban:

60 hari

20. Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan Surat Paksa, apabila Penanggung belum melakukan pelunasan sejak tanggal penerbitan Surat Teguran paling lambat

Jawaban:

21 (dua puluh satu) hari

21. Pemberitahuan Surat Paksa, kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh

Jawaban:

Juru Sita Bea Cukai

22. Surat penetapan yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran dalam dokumen PIB Adalah
Jawaban

SPTNP

23. Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan, apabila Penanggung Bea Masuk belum melakukan pelunasan sampai lewat batas waktu Surat Paksa paling lama

Jawaban:

2 x 24

24. Kesalahan pemberitahuan atas tarif barang impor

Jawaban:

Tidak dapat dikenai sanksi administrasi

25. Importir yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara setelah habis jangka waktu penggunaannya dikenai sanksi administrasi sebesar

Jawaban:

100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar

26. Sanksi Administrasi Berupa Denda Dalam Presentase Tertentu Minimum Sampai Maksimum Dari Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, apabila kekurangan pembayaran di atas 150% (seratus lima puluh persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari total bea masuk yang telah dibayar yang dikenakan denda sebesar

Jawaban:

175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk

27. Sanksi Administrasi Berupa Denda Dalam Presentase Tertentu Minimum Sampai Maksimum Dari Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, apabila kekurangan pembayaran di atas 400% (empat ratus persen) sampai dengan 450% (empat ratus lima puluh persen) dari total bea masuk yang telah dibayar yang dikenakan denda, maka dikenakan denda sebesar

Jawaban:

600% (enam ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk

28. Banding terhadap keputusan keberatan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak dalam waktu

Jawaban:

60 hari sejak tanggal keputusan keberatan

29. Atas putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh wajib pajak ke Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu

Jawaban:

90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak

30. Berikut ini alternatif putusan atas pengajuan banding, kecuali

Jawaban:

Membetulkan kesalahan hitung

Larangan dan Pembatasan

1. Melindungi masyarakat dari barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas merupakan pengertian salah satu fungsi kepabeanan yaitu:

Jawaban:

Community Protector

2. Barang yang dikenakan aturan lartas yang diberitahukan secara tidak benar pada pemberitahuan pabean impor atau ekspor diperlakukan:

Jawaban:

Sebagai Barang di kuasai negara

3. Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan lartas, instansi terkait yang menetapkan peraturan lartas atas impor atau ekspor barang tertentu wajib memberitahukan kepada?

Jawaban:

Menteri Keuangan

4. Dalam hal perijinan lartas impor telah menggunakan INSW dan ijin lartas belum terpenuhi maka atas PIB yang diberitahukan

Jawaban:

Ditolak untuk di lengkapi perijinan nya

5. Pembatasan impor Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) dengan Pos Tarif/HS 1701.99.10 adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi dan memiliki bilangan ICUMSA

Jawaban:

maksimal 75 IU

6. Dalam hal perijinan lartas impor dilakukan oleh pejabat peneliti lartas dan ijin lartas belum terpenuhi maka pejabat Bea dan Cukai

Jawaban:

Menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Lartas (NPBL)

7. Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya wajib menggunakan Laporan Surveyor apabila dilakukan oleh?

Jawaban:

Importir (API-P) sebagai industri pengguna Certificate of Origin (SKA)

8. Impor Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan, hanya untuk produk?

Jawaban:

Makanan dan minuman

9. Karung bekas termasuk barang impor yang?

Jawaban:

Dilarang impor

10. Psikotropika termasuk barang impor yang?

Jawaban:

Dibatasi impornya

11. Ekspor sisa dan skrap logam dari baja paduan hanya dapat dilakukan oleh eksportir pada?

Jawaban:

Pulau Batam

12. Contoh barang impor yang wajib LS Adalah

Jawaban:

Produk tekstil

13. Persyaratan ekspor produk industri kehutanan yang merupakan jaminan legalitas kayu yang digunakan dalam produk industri kehutanan Adalah

Jawaban:

Dokumen V-Legal

14. Barang cagar budaya

Jawaban:

Dilarang diekspor

15. Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan PI Limbah Non B3 dari

Jawaban:

Menteri Perdagangan

16. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait belum terlampir pada PEB, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang lartas menerbitkan

Jawaban:

NPPD

17. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor jika telah diajukan pemberitahuan pabean maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut, kecuali

Jawaban:

Dapat disita oleh DJBC

18. Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik hanya dapat dilakukan pada Pelabuhan

Jawaban:

Belawan, Medan

19. Impor tekstil dan produk tekstil yang wajib memiliki izin TPT adalah importasi yang dilakukan oleh perusahaan di

Jawaban:

Kawasan Perdagangan Mangga Dua

20. Jenis flora dan fauna yang dianggap sangat langka dan dilarang untuk diperdagangkan, dimuat didalam CITES Appendix

Jawaban:

Appendix I

21. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar

Jawaban:

5% sampai dengan 20%

22. Salah satu barang yang dilarang diimpor Adalah

Jawaban

Petasan

23. Jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh anggota Perbakin yang diperuntukkan dalam olahraga berburu dari berbagai kaliber berdasarkan usulan Pengda yang disetujui oleh PB Perbakin dibatasi paling banyak

Jawaban:

6 (enam) pucuk senjata api

24. Izin Pemasukan (impor) senjata api dan amunisi ditandatangani oleh

Jawaban:

Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri

25. Barang yang pembatasan impornya diatur oleh Kementerian Pertanian Adalah

Jawaban:

Pestisida

26. Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika atau psikotropika Adalah

Jawaban:

Prekursor

27. Barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya, namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya disebut
Jawaban:

Reja

28. Barang yang dilarang diekspor Adalah
Jawaban:

Kayu untuk bantalan rel kereta api

29. Daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan Adalah

Jawaban:

Appendix II

30. Orang dapat membawa mata uang Rupiah keluar wilayah RI dengan batasan jumlah dan perijinan

Jawaban:

Rp 100.000.000,- atau lebih setelah mendapat izin BI

Sistem Nilai Pabean

1. Mengacu kepada BDV, sebelum tahun 1997 nilai pabean menggunakan rujukan

Jawaban:

Harga patokan

2. Berikut ini adalah definisi barang serupa

Jawaban:

Meskipun tidak (sampai derajat) sama dalam segala hal tetapi memiliki karakter fisik sama, komponen material sama, berfungsi sama dan secara komersial saling dapat dipertukarkan dibuat dinegara yang sama oleh produsen yang sama atau yang berbeda

3. Yang dimaksud dengan "harga yang sebenarnya dibayar" dalam konsep nilai transaksi Adalah

Jawaban:

Harga yang telah dibayar lunas pada saat barang diimpor

4. Berdasarkan WTO Valuation Agreement, nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu pilihan dari

Jawaban:

6 (enam) metode

5. Dalam rangka menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode VI, Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan

Jawaban:

Harga pasar barang impor yang identik di tingkat retailer di daerah pabean

6. Berikut ini adalah biaya yang harus dikurangkan dari nilai transaksi barang impor yang diberitahukan dengan terminologi harga DDP

Jawaban:

Post Importation Cost

7. Biaya promosi dan pembukaan L/C yang dibayar pembeli

Jawaban:

Tidak termasuk nilai pabean

8. Importir I mengimpor 1 (satu) CD master film untuk digandakan pada CD buatan daerah pabean sebanyak 2.000 pcs. Harga master USD 1,000.- dan setiap CD film yang digandakan importir dikenakan royalti sebesar USD 10. Nilai transaksi atas importasi tersebut Adalah

Jawaban:

USD 1,000.-

9. Dalam hal transaksi menggunakan harga futures, tanggal penyelesaian (settlement date) paling lambat

Jawaban:

90 hari sejak tanggal PIB

10. Deklarasi Nilai Pabean wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam waktu paling lambat

Jawaban:

3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan INP bila melalui media elektronik

11. Biaya freight harus ditambahkan pada nilai transaksi jika terminologi penyerahan barang

Jawaban:

EXW, FOB dan FAS

12. Bagian dari hasil penjualan atau pemanfaatan barang yang dipasok oleh importir kepada eksportir disebut

Jawaban:

Proceed

13. Dalam suatu transaksi diketahui Nilai CIF sebesar USD 1.000,- Importir membayar biaya perantara yang tidak mewakili pihak manapun sebesar USD 50,- dan biaya surveyor sebesar USD 50,- Nilai transaksi sebesar

Jawaban:

USD 1.050,-

14. PT. AAA mengimpor barang X dari Taiwan dengan harga CIF USD 1.000,-. Karena PT AAA membeli secara tunai, diberikan potongan harga sebesar 5%. Nilai transaksi untuk barang X adalah

Jawaban:

CIF USD 950,-

15. P mengimpor mesin industri dari S di Jerman dengan harga yang disepakati adalah CIF USD 200,000. Termasuk pada harga tersebut adalah biaya pemasangan mesin di Indonesia dengan nilai USD 10,000.- serta bantuan teknis berupa pelatihan pegawai A dengan nilai USD 15,000.- Nilai transaksi atas barang tersebut sebesar

Jawaban:

USD 175,000

16. Diskon yang diberikan sebagai bentuk perbedaan tingkat perdagangan (wholeseller, retailer dan end user) disebut

Jawaban:

Trade Discount

17. Dalam hal biaya royalti tidak dapat ditentukan saat barang diimpor, maka

Jawaban:

Nilai transaksi diterima jika importir menggunakan mekanisme voluntary declaration

18. Salah satu syarat suatu data dapat digunakan dalam penetapan metode III Adalah

Jawaban:

Negara asal sama

19. Didalam penggunaan Metode II, jika terdapat lebih dari satu data barang identik yang memenuhi syarat, maka Pejabat Bea dan Cukai wajib memilih

Jawaban:

Data yang paling rendah

20. Syarat penggunaan metode II adalah adanya data di pihak Pabean dimana tanggal B/L atau AWB barang identic

Jawaban:

sama atau dalam waktu 30 hari sebelum atau 30 hari sesudah tanggal B/L atau AWB dari PIB yang sedang ditetapkan nilai pabeannya

21. Importir A memberitahukan nilai pabean barang X sebesar USD 150,- Tidak terdapat database untuk menguji kewajaran nilai yang diberitahukan.

Keputusan Pejabat Bea dan Cukai Adalah

Jawaban:

Menerbitkan Informasi Nilai Pabean

22. Metode komputasi adalah metode penetapan nilai pabean berdasarkan penjumlahan unsur-unsur biaya berikut

Jawaban:

Biaya/harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan, pengeluaran umum, biaya pengangkutan, pemuatan, cargo handling, asuransi sampai pelabuhan tujuan di Daerah Pabean

23. Diberitahukan dengan PIB suatu barang buatan Korea Selatan, tanggal PIB 02/08/2024. Data penjualan barang identik di pasar dalam daerah pabean yang diajukan importir terjadi pada tanggal 29/07/2024. Jika Pejabat Bea dan Cukai menggunakan data tersebut sebagai dasar penetapan nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai menggunakan

Jawaban:

Metode IV

24. Yang dimaksud 'harga jual dipasar dalam daerah pabean', didalam metode deduksi Adalah

Jawaban:

Harga jual importir

25. Yang dimaksud dengan harga pasar didalam daerah pabean di dalam penerapan metode VI Adalah

Jawaban:

Harga jual ditingkat retailer atau whole saler

26. Voluntary Declaration dapat dilakukan atas impor barang dalam kondisi

Jawaban:

Terdapat royalti, proceed, atau karena harga future

27. Diberitahukan PIB dengan jenis barang kamera digital 50 MP merek Sony, Made in Japan dengan tanggal B/L 14/06/2024. Data di pihak pabean adalah barang kamera digital 50 MP merek Samsung Made in Vietnam dengan tanggal B/L 20/05/2024. Jika Pejabat Bea dan Cukai menggunakan data tersebut sebagai dasar penetapan nilai pabean, maka ia menggunakan Jawaban:

Metode VI

28. Test Value untuk menguji hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak menggunakan data dari Jawaban:

Harga barang identik dengan selisih tanggal B/L paling lama 30 hari

29. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang didapatkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, maka Pejabat Bea dan Cukai Jawaban:

Menetapkan nilai pabean berdasarkan metode II s/d VI secara hierarki

30. Polis asuransi untuk penghitungan nilai pabean tidak dapat diakui kebenarannya jika Jawaban:

Perjanjian asuransi dilakukan setelah tanggal pengapalan barang